

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dua pengamatan, pertama pengaruh implementasi kebijakan, dan kedua kendala terhadap proses pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pengoperasian terminal Hutaimbaru Pal IV Maria Kota Padangsidimpuan, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Implementasi kebijakan Pengoperasian Terminal

Implementasi kebijakan Pengoperasian Terminal Hutaimbaru Pal IV Maria Kota Padangsidimpuan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, diantaranya :

- a. ketidakjelasan prosedur menjalankan standar SK Walikota nomor: 171/KPTS/2014 sebagai patokan untuk menjalankan pengoperasian terminal Hutaimbaru khususnya pada lin trayek angkutan yang sangat berefek pada aktifitas keseharian masyarakat, sehingga pelaku usaha (supir Angkutan) melakukan kesepakatan bersama didalam internal supir angkutan. Selain itu, kurang matangnya pemerintah dalam persiapan sebelum pembangunan seperti kesiapan terminal yang belum jelas dengan tipe terminal.
- b. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan diturunkan dilapangan cukup memadai sesuai keahlian dalam bidangnya dengan pengelolaan terminal yang bantu

oleh operasi gabungan yaitu bakortiblantasi meskipun berlangsung sehabis penuh pada saat peresmian terminal. Selain itu lokasi terminal menjadi masalah sehingga daya tarik supir angkutan karena jalur trayek beda angkutan yang satu arah menjadikan para supir angkutan merasa masuk ke dalam terminal hanya merugikan sesama internal mereka karena berebut menaikkan penumpang.

- c. Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kota ada kesalahpahaman penginstruksian TUPOKSI akibat dari kurangnya hubungan antar internal dinas, seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan asset Daerah kota Padangsidimpuan yang konteks dilapangan dikelola oleh dishubkominformo Kota Padangsidimpuan. Dan selain itu minimnya komunikasi dan koordinasi kepada Organda menjadikan kesalahpahaman bagi para supir angkutan karena berbeda instruksi, sehingga para supir angkutan membuat kesepakatan internal untuk menyelesaikan ketidaknyamanan internal supir angkutan dalam pengalihan trayek angkutan.
- d. Koordinasi antara agen pelaksana atau implementor menentukan tingkat keberhasilan sebuah pengoperasian terminal Hutaimbaru, didalam penelitian ini koordinasi antar implementor sangat baik akan tetapi implementor kurang memahami TUPOKSI yang seharusnya dijalankan efek bergantinya posisi jabatan. Implementor sebagai penggerak untuk menjalankan pengoperasian terminal dinyatakan gagal karena SOP yang ditetapkan tidak

dipahami sehingga kerjasama dari pihak dinas terkait hanya menunggu instruksi dari atasan.

- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kurang memahami dan menindak tegas pengoperasian terminal sehingga lembaga kepemudaan yang sudah mengawasi pengawasan terminal Hutaimbaru yang menunjukkan pemerintah tidak mampu mengawasi pengoperasian terminal Hutaimbaru, karena kondisi politik pemerintah ada campur tangan dari lembaga kepemudaan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
- f. Disposisi implementor juga termasuk pengaruh penunjang berhasil atau tidak kebijakan pengoperasian terminal Hutaimbaru. Sejak didalam struktur birokrasi Dinas terkait (dishubkominfo) ada pergantian posisi sangat berefek kepada hubungan internal dishubkominfo sehingga pemahaman menyelesaikan permasalahan pengoperasian terminal Hutaimbaru sangat kurang.

2. Kendala pengimplementasian kebijakan

Kendala-kendala pengimplementasian kebijakan yang ditemukan adanya didalam internal dinas terkait yang menjabat baru diganti sehingga hubungan yang saling bergantung terjadi pada internal dinas terkait menyebabkan tidak ada keseriusan dalam pengimplementasian pengoperasian terminal Hutaimbaru, dan kondisi eksternal adanya campurtangan pihak lembaga kepemudaan mengawasi pengoperasian terminal hutaimbaru.

1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dan menyimpulkan kesimpulan yang sudah peneliti jelaskan diatas mengenai implementasi kebijakan terminal Hutaimbaru Pal Maria Kota Padangsidimpuan, maka dari beberapa saran yang perlu peneliti berikan untuk kemajuan pengoperasian terminal Hutaimbaru Pal Maria kedepannya.

- a. Peneliti belum sampai tahap evaluasi implementasi kebijakan, dalam perjalanannya masih baru pada tahap proses pelaksanaan, oleh sebab itu, penelitian selanjutnya akan membahas tentang implementasi kebijakan sebaiknya meneliti tentang peran dan sikap pemerintah dalam menjalankan pengoperasian terminal Hutaimbaru.
- b. Pemerintah harus menyediakan pengalokasian anggaran dana untuk pelaksanaan mulai dari tahapan sosialisasi sampai tahapan berjalannya terminal Hutaimbaru sehingga nantinya akan melancarkan kegiatan pelaksanaan dilapangan.
- c. Pemerintah harus merunut ulang kembali SK Walikota/KPTS/2014 dengan mengajak para supir angkutan yang sebagaia memahami suasana kondisi lapangan trayek yang mereka lalui dan menyegerakan melegalkan kejelasan tipe status terminal menjadi C dan menyampaikan kepada masyarakat alasan mengambil keputusan tersebut agar tidak ada lagi kebingungan pada pelaku usaha kebijakan dalam menjalankan pengoperasian terminal Hutaimbaru.

- d. Pemerintah harus serius ikut andil menanggapi kesepakatan internal para supir angkutan yang sudah terjadi dilapangan, agar tidak memperkeruh suasana dan mengembalikan pada koridor aturan yang sudah ditentukan.
- e. Dalam menunjang lancarnya proses pengoperasian terminal Hutaimbaru Pal Maria Kota Padangsidimpuan kedepannya, pemerintah daerah harus membuat tim pengawas untuk mengawasi proses pengoperasian terminal Hutaimbaru yang dilakukan dinas penanggungjawab.
- f. Dinas terkait harus merunut ulang komunikasi dan koordinasi penanggungjawab pelaksana hasil retribusi yang seharusnya sampai ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan asset Daerah kota Padangsidimpuan. Begitu juga dengan non-pemerintahan seperti Organda Kota Padangsidimpuan, dinas terkait harus harus mengajak Organda mendukung dan berpartisipasi dalam menjalankan proses berjalannya terminal Hutaimbaru karena supir angkutan yang tidak taat pada aturan harus ditindaktegas. Organda selaku pemberi izin direksi beroperasi harus menyegerakan menurunkan anggotanya khusus diterminal Hutaimbaru.
- g. Kendala-kendala yang ditemukan didalam internal dinas terkait, pemerintah harus kembali mempertegas pegawai dan anggotanya dilapangan agar berjalan sesuai dengan SOP karena itu sudah menjadi standarisasi implementor agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Dan begitu juga kendala yang ditemukan didalam pengoperasian terminal Hutaimbaru, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada hubungan PP (Pemuda Pancasila) mengenai pengelolaan terminal Hutaimbaru.